

PENGARUH PENERAPAN GCG, AUDIT INTERNAL DAN *WHISTLEBLOWING* TERHADAP PENCEGAHAN *FRAUD* DI LPD DENPASAR SELATAN

Ni Kadek Dwi Adnyani⁽¹⁾

Putu Nuniek Hutnaleontina⁽²⁾

⁽¹⁾⁽²⁾ Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi Bisnis dan Pariwisata, Universitas Hindu Indonesia
 Jalan Sangalangit, Tembau, Penatih, Denpasar, Bali
 e-mail : adnyanidwi006@gmail.com

ABSTRACT

Fraud is a variety of fraudulent acts, whether committed intentionally or unintentionally by third parties. The targets of extortion incorporate forestalling misrepresentation in all lines of the association, hindering expected culprits., making it difficult for fraud perpetrators to move, recognizing high-risk exercises and control shortcomings, and making demands or forcing sanctions on fraud culprits. The motivation behind this study was with determine the impact of implementing good corporate governance, the role of internal audit and the whistleblowing system on the prevention of fraud at Village Credit Institutions in South Denpasar District. The population in this study were all LPD in South Denpasar as many as 10 LPD. The method of determining the sample using the saturated sampling method so that obtained 117 respondents. The type of research used is quantitative. The analytical method used is multiple linear regression. Based on the analysis test results, it is found that good corporate governance had a beneficial outcome on misrepresentation. Meanwhile, the role of internal audit and the whistleblowing system had a positive and insignificant effect on fraud

Keywords: *GCG, audit, whistleblowing , fraud prevention.*

PENDAHULUAN

Pulau Dewata merupakan daerah yang masih memiliki ciri khas di bidang sosial budaya. Peran Desa Pakraman sangat luas di bidang adat istiadat serta religius, tetapi termasuk pelayanan umum dan ekonomi. Di Bali terdapat lembaga keuangan mikro selain perbankkan yang berperan besar dalam pembangunan ekonomi daerah terdapat juga Lembaga Perkreditan Desa (LPD) yang ada di setiap desa pakraman. LPD untuk yang pertama dibangun pada tahun 1985 sebagai organisasi milik desa yang memberikan bantuan kepada masyarakat setempat untuk memperoleh bantuan berupa uang, baik yang dipakai untuk biaya awal membuka usaha maupun kepentingan lainnya. Namun beberapa tahun belakangan banyak kasus-kasus kecurangan di LPD yang disebabkan oleh lemahnya pengawasan baik dari pihak internal maupun eksternal. Isu penyelewengan dana LPD atau tindak korupsi juga menjadi permasalahan yang cukup sering terjadi di LPD.

Pemerasan adalah jenis kegiatan yang disengaja oleh setidaknya satu orang didalam asosiasi atau pertemuan yang terlibat dengan tugas , staff, atau orang ketiga yang

menggunakan tipu daya untuk mendapatkan keuntungan yang mengerikan atau mengabaikan peraturan yang sah. Berdasarkan banyaknya kasus penyelewengan dana LPD maka diperlukan adanya upaya dalam pencegahan kecurangan. Penerapan *Good Corporate Governance* bias dijadikan Langkah dalam mencegah adanya pemerasan. *Good Corporate Governance* merupakan suatu alat ukur yang mengontrol asosiasi yang memerikan nilai lebih kepada semua pemilik saham (Monks,2003). Tingginya intensitas kecurangan yang terjadi dalam suatu organisasi mengharapakan bahwa Yayasan menjalankan bisnis besar dewan secara andal dan lengkap.

Upaya lain yang bisa digunakan untuk mencegah kecurangan yaitu dengan adanya Audit Internal. Untuk menggapai tujuan lembaga yang telah ditetapkan, peran audit internal sangatlah dibutuhkan. Audit internal yang diterapkan pada suatu lembaga adalah latihan evaluasi dan konfirmasi atas SOP, data yang dicatat berdasarkan peraturan dan rencana kelembagaan, untuk fungsinya dalam upaya memperhatikan kegiatan suatu lembaga. Dengan dilakukan audit internal secara berkala maka dapat meminimalisir terjadinya kecurangan karena pegawai akan bekerja jujur dan efisien jika sewaktu-waktu diadakan pengauditan laporan keuangan.

Selain penerapan *good corporate governance* dan audit internal, pelaksanaan *whistleblowing system* juga dapat dijadikan langkah untuk mencegah kecurangan. *Whistleblowing* diartikan sebagai pengungkapan kebenaran atas pelanggaran yang melanggar hukum yang dilakukan oleh pegawai maupun pimpinan. Penerapan *whistleblowing system* ini bisa digunakan sebagai early admonition framework adanya kecurangan (*fraud*). Dalam hal pemerasan (*fraud*) dapat dibedakan lebih awal, semakin sedikit tindakan palsu yang dilakukan. Dalam hal pelaksanaan kerangka pelaporan pelanggaran ini dapat berjalan dengan baik, pemerasan dapat dicegah di kantor atau asosiasi.

Perkembangan LPD di Bali yang semakin pesat , sudah ada 1.436 Unit LPD yang tersebar di Bali. Namun tidak semua LPD di Bali sehat. Khusus untuk LPD yang dinyatakan sehat berjumlah 909 LPD (63,43 persen) (balipolitika.com). Penyebab ketidak sehatan LPD ini dikarenakan banyaknya kasus korupsi yang semakin marak di LPD. Beberapa LPD di Badung dan Denpasar beberapa yang terdaftar sebagai penggugat,tergugat dan co-responden. Ada yang tergabung isu termasuk demonstrasi melawan hokum, ada yang wanprestasi dan ada yang bersifat umum. Kasus

penyelewengan dana LPD atau tindak korupsi juga menjadi permasalahan yang cukup sering terjadi di LPD.

Peneliti tertarik melakukan penelitian di kecamatan Denpasar Selatan untuk mengetahui kondisi dan bagaimana upaya pencegahan *fraud*, apakah pengendalian internal seperti penerapan *good corporate governance*, audit internal serta *whistleblowing* sudah berjalan secara optimal guna meminimalisir terjadinya kecurangan, karena pemberitaan kasus korupsi yang baru-baru ini terjadi di salah satu LPD di Denpasar Selatan. Pada pemberitaan yang ada (www.baliekbis.com), kerusuhan di dalam LPD Serangan berawal saat adanya berita tentang LPD tahun 2019 kepada pelopor daerah, termasuk pertemuan konvensional Desa Serangan yang diadakan pada Juli 2020. Bagaimanapun, laporan itu melacak beberapa kejanggalan berupa pinjaman palsu. Kemudian dilakukan peninjauan terhadap LPD Desa Adat Serangan. Setiap kali hasil peninjauan keluar, terungkap adanya inkonsistensi mulai sekitar 2015. Selanjutnya, dugaan penyelewengan aset, LPD Desa Adat Serangan tidak beroperasi sejak Oktober 2020. Cadangan aset LPD tersisa Rp 168 ribu dari sumber dana Rp 7,2 miliar.

Dari latar belakang berikut, peneliti ingin melakukan penelitian yang berjudul ” **Pengaruh Penerapan GCG, Audit Internal dan Whistleblowing Terhadap Pencegahan *Fraud* di LPD Kecamatan Denpasar Selatan**”.

Penelitian ini memiliki tujuan guna mengetahui pengaruh penerapan *good corporate governance*, peran audit internal dan *whistleblowing system* terhadap pencegahan *fraud* di LPD kecamatan Denpasar Selatan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan berupa gambaran, bahan dan wawasan yang lebih luas mengenai pengaruh penerapan *good corporate governance*, peran audit internal dan *whistleblowing system* terhadap pencegahan *fraud*, dapat dijadikan referensi dan mengambil keputusan dalam manajemen organisasi

KAJIAN PUSTAKA

Cressey (1953) dalam teorinya Fraud Triangle memberi pendapat berupa 3 alasan yang bisa menimbulkan adanya kecurangan:

- i) Ketegangan/dorongan yang tidak dapat dibagi, factor tekanan yang dapat memicu pemerasan dapat muncul dari keinginan, keadaan keuangan, factor gairah individu seperti iri hati, penghargaan dan pembalasan.

- ii) Peluang atau kesempatan adalah suatu kondisi yang dimanfaatkan oleh seseorang untuk melakukan kegiatan palsu. Pintu-pintu terbuka muncul dari kondisi internal kontrol yang lemah, tidak adanya pengawasandan orang-orang yang menyalahgunakan wewenang. Pemerasan dari pintu terbuka ini dapat dibatasi dengan menyelesaikan proses penemuan awal dan melakukan kontrol yang baik terhadap kesalahan penyajian,
- iii) Pembetulan adalah situasi dimana pelaku misrepresentasi berusaha memperlihatkan bahwa yang diperbuat sesaat sebelum melakukan pemerasan.

Hal ini dilakukan agar perbuatan melawan hokum yang sebenarnya masih tetap dipercaya meskipun ia telah melakukan pemerasan. Kepedulian ditunjukkan oleh pelakunya sebelum melakukan pemerasan, dan tidak ditampilkan setelah melakukan pemerasan.

Good Corporate Governance (GCG) menurut definisi adalah kerangka kerja yang mengarahkan dan mengendalikan organisasi yang membuat insentif tambahan untuk semua mitra (Monks,2003). Keberhasilan pemanfaatan standar administrasi perusahaan yang baik dapat mencegah pungli. Ada empat bagian utama yang diperlukan dalam konsep *good corporate governance*, (Kaen, 2003; Shaw, 2003) yaitu kesopanan, keterusterangan, tanggung jawab, dan kewajiban. Keempat bagian ini mengingatkan fakta bahwa penggunaan standar administrasi perusahaan yang baik secara konsisten telah terbukti bekerja pada sifat laporan keuangan dan juga dapat menjadi metode yntyk bekerja pada sift keuangan. Pratomo Cahyo Kunrniawan (2019) dalam penelitiannya menemukan hasil penerapan *good corporate governance* berpengaruh positif terhadap pencegahan *fraud*. Setelah itu Ni Putu Yulia Paramita (2020) dalam penelitiannya menemukan hasil *good corporate governance* berpengaruh positif terhadap pencegahan *fraud*. Berdasarkan uraian diatas maka hipotesis yang diajukan peneliti :

H1 : Penerapan *Good Corporate Governance* Berpengaruh Positif Terhadap Pencegahan *Fraud*

Audit Internal adalah tindakan bebas yang memberikan penegasan dan konseling objektif yang dimaksudkan untuk menambah garfa diridan mengerjakan tugas-tugas asosiasi. Gerakan ini membantu asosiasi dalam mencapai tujuannya dengan cara yang metodis dan terkendali untuk menangani penilaian dan bekerja pada kecukupan kesempatan proses administrasi, pengendalian, dan admisnistrasi. Dengan adanya peran audit internal dalam suatu lembaga dapat mencegah terjadinya kecurangan karena apabila

audit internal dilakukan secara berkala maka para pegawai akan bekerja dengan jujur dan efisien karena sewaktu-waktu adanya pengauditan yang dilakukan secara tiba-tiba (*surprise audit*). Made Agus Adi Suputra (2021) dalam penelitiannya menemukan hasil audit internal berpengaruh positif terhadap pencegahan fraud. Berdasarkan uraian diatas, maka hipotesis kedua yang diajukan peneliti :

H2 : Peran Audit Internal Berpengaruh Positif Terhadap Pencegahan *Fraud*

Whistleblowing diartikan sebagai pengungkapan demonstrasi pelanggaran atau demonstrasi yang melanggar hukum, demonstrasi moral atau demonstrasi yang berbeda yang bisa menimbulkan kerugian organisasi yang dilakukan oleh pegawai atau pimpinan. Dengan adanya pelaksanaan *whistleblowing system* maka tindakan kecurangan dapat diminimalisir, karena tidak hanya pimpinan yang melakukan pengawasan tetapi semua pegawai dapat saling mengawasi satu sama lain sehingga seseorang akan berfikir berulang kali untuk melakukan kecurangan karena banyaknya mata-mata dilingkungan kerja. Made Agus Adi Suputra (2021) dalam penelitiannya menemukan bahwa *whistleblowing system* berpengaruh positif terhadap pencegahan *fraud*, kemudian Ni Ketut Muliati (2021) dalam penelitiannya menemukan bahwa *whistleblowing* berpengaruh positif terhadap pencegahan *fraud*. Berdasarkan uraian diatas, maka hipotesis ketiga yang diajukan peneliti:

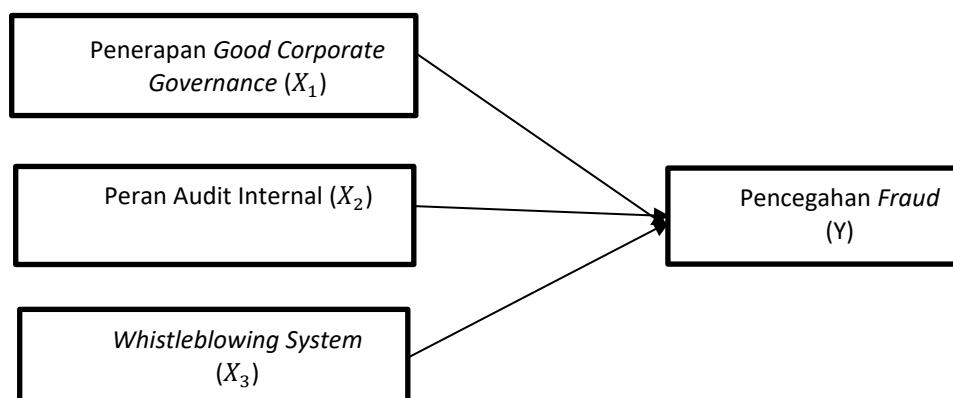
H3 : *Whistleblowing System* Berpengaruh Positif Terhadap Pencegahan *Fraud*

METODE PENELITIAN

Data kuantitatif adalah jenis data yang dipilih untuk penelitian ini. Dalam penelitian ini data kuantitatif adalah menggunakan yang diperoleh dari responden terhadap item soal yang terdapat di pertanyaan penelitian.

Gambar 3.1 Kerangka Berfikir Peneliti

“Pengaruh Penerapan Good Corporate Governance, Peran Audit Internal dan Whistleblowing System Terhadap Pencegahan Fraud Pada Lembaga Perkreditan Desa Di Kecamatan Denpasar Selatan”



Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh Lembaga Perkreditan Desa Denpasar Selatan sebanyak 10 LPD dengan responden berjumlah 117 responden yang antara lain Ketua LPD, Pengawas LPD, Bagian Tabungan dan Bagian Kredit. Penentuan sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik nonprobability sampling dengan teknik sampling jenuh.

Teknik analisis data yang digunakan dalam merumuskan hipotesis sebagai berikut :

1. Uji Validitas digunakan untuk mengukur keabsahan atau legitimasi suatu survei dan seberapa kuat hubungan suatu variabel dengan factor yang berbeda (Sugiyono, 2014: 172). Uji validitas seharusnya dapat dilakukan dengan menghubungkan skor komponen dengan skor absolut, jika keterkaitan setiap elemen bernilai positif ($r > 0,3$) instrumen eksplorasi dapat dianggap substansial.
2. Uji Reliabilitas digunakan untuk mengukur konsistensi factor eksplorasi. Polling padat adalah survei yang bila dicoba lebih dari satu kali ke pertemuan serupa akan memberikan informasi serupa. Instrumen dikatakan solid jika bernilai *Cronbach Alpha* $> 0,60$ (Sugiyono, 2014: 173).

Uji Asumsi Klasik berfungsi untuk mengecek apakah model regresi menunjukkan hubungan yang signifikan. yang terdiri dari:

1. Uji Normalitas berencana untuk menguji apakah pada model relaps factor jgging atau sisa memiliki sirkulasi yang khas (Ghozali, 2011:160). Dalam ulasan ini, tes terukur non-parametik *Kolmogrov-smirnov* digunakan dengan aturanyang menyertai:
 H_0 diterima jika bernilai p-value pada kolom Asimp. Sig (2- tailed) $>$ level of significant ($\alpha=0,05$), sebaliknya H_a ditolak.
 H_0 diterima jika bernilai p-value pada kolom Asimp. Sig (2- tailed) $<$ level of significant ($\alpha=0,05$), sebaliknya H_0 diterima.

SMA sebanyak 70 orang, responden tamatan Diploma berjumlah 11 orang dan responden yang berpendidikan terakhir Sarjana (S1,S2,S3) sebanyak 36 orang.

Hasil pengujian analisis deskriptif pada variable *good corporate governance* (X1) bernilai *minimum* sebesar 36, bernilai *maksimum* sebesar 50, nilai *mean* sebesar 43.31, dan *standar deviation* sebesar 2.799, variabel peran audit internal (X2) bernilai *minimum* sebesar 9, bernilai *maksimum* sebesar 15, nilai *mean* sebesar 12.22, dan *standar deviation* sebesar 1.427, variabel *whistleblowing system* (X3) bernilai *minimum* sebesar 27, bernilai *maksimum* sebesar 40, nilai *mean* sebesar 31.03, dan *standar deviation* sebesar 2.378, variabel pencegahan *fraud* (Y) mempunyai nilai *minimum* sebesar 35, nilai *maksimum* sebesar 50, nilai *mean* sebesar 42.36, dan *standar deviation* sebesar 4.147.

Hasil uji validitas dan reliabilitas menunjukkan variabel *good corporate governance*, peran audit internal dan *whistleblowing system* memiliki nilai korelasi $>0,30$ dan memiliki koefisien alpha $>0,60$ sehingga dinyatakan valid dan layak dijadikan sebagai alat ukur instrumen dalam penelitian ini.

Hasil uji normalitas nilai signifikansi dan *unstandardized residual* $>0,05$ yaitu bernilai 0,175, sehingga dapat disimpulkan data yang digunakan dalam penelitian ini sudah reliabel. Pada uji multikolinieritas, nilai tolerance pada setiap variabel $>0,10$ (X1=0,982, X2=0,982, X3=0,965) maka dapat disimpulkan model regresi tidak terjadi multikolinieritas. Hasil uji heteroskedastisitas menunjukkan bahwa masing-masing variabel memiliki nilai signifikansi $>0,05$ atau (X1=0,593, X2=0,470, X3=0,780) berarti dalam model regresi tidak terjadi heteroskedastisitas.

Berdasarkan hasil pengujian uji F, menghasilkan F hitung sebesar 8,095 dan bernilai signifikansi sebesar 0,000 lebih kecil dari 0,05. Hal ini berarti *good corporate governance*, audit internal, dan *whistleblowing system* secara bersama-sama berpengaruh secara signifikan pada pencegahan *fraud*. Hasil uji R square didapatkan bahwa nilai R^2 sebesar 0,155. Hal ini menunjukkan bahwa variabel bebas (*good corporate governance*, audit internal, dan *whistleblowing system*) dapat menjelaskan variabel pencegahan *fraud* sebesar 15,5%. Sisanya sebesar 84,5% diterangkan oleh variabel lain diluar model pada taraf kepercayaan 100%

Uji hipotesis uji t dapat dilakukan dengan membandingkan tingkat signifikansi masing-masing variabel bebas dengan $\alpha = 0,05$. Jika nilai signifikansi $> 0,05$ maka variabel X tidak berpengaruh terhadap variabel Y, sedangkan jika nilai signifikansi $<$

Maulidya (2018) yang mengatakan bahwa peran audit internal berpengaruh positif tidak signifikan terhadap pencegahan fraud.

3. Pengaruh *Whistleblowing System* Terhadap Pencegahan *Fraud*

Berdasarkan hasil uji, *whistleblowing system* berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap pencegahan *fraud* dengan nilai signifikansi $0,262 > 0,05$ dan koefisien sebesar 0,130, maka hipotesis H3 ditolak. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa adanya hubungan positif antara *whistleblowing system* dan dengan pencegahan *fraud* dan mampu mencegah terjadinya kecurangan tetapi tidak secara optimal, dalam artian semakin meningkatnya *whistleblowing system* tidak serta merta mampu meningkatkan pencegahan *fraud*. Dengan tujuan akhir untuk mencegah misrepresentasi, tidak semua organisasi memiliki kerangka kerja *whistleblowing* yang berhasil di dalam kantor sehingga tidak dapat dimanfaatkan secara ideal oleh perwakilan. Adanya konflik moral juga menjadi penyebab kurang optimalnya *whistleblowing system*. Sesuai teori yang menyatakan tidak banyak orang yang mau menjadi *whistleblower* karena dianggap bertolak belakang dengan loyalitas seseorang sehingga *whistleblowing* sering menjadi konflik perilaku (Dungan, et al., 2019). Hasil hipotesis yang sama juga diperoleh dari penelitian yang dilakukan oleh Yutdi Yuwono (2018) yang menyatakan bahwa *whistleblowing system* berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap pencegahan *fraud*.

SIMPULAN DAN SARAN

Menurut hasil pengujian terhadap hipotesis, maka kesimpulan yang dapat penulis ambil yaitu antara lain:

1. Penerapan *Good Corporate Governance* (X1) berpengaruh positif terhadap pencegahan *fraud*. Semakin baik penerapan *good corporate governance* maka semakin baik juga pencegahan *fraud* di Lembaga Perkreditan Desa di Kecamatan Denpasar Selatan.
2. Peran Audit Internal (X2) berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap pencegahan *fraud*. Dalam hal ini semakin meningkatnya peran audit internal tidak serta merta mampu meningkatkan pencegahan *fraud* di Lembaga Perkreditan Desa di Kecamatan Denpasar Selatan

3. *Whistleblowing System* (X3) berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap pencegahan *fraud*. Semakin meningkatnya *whistleblowing system* dalam perusahaan tidak serta merta mampu meningkatkan pencegahan *fraud* di Lembaga Perkreditan Desa di Kecamatan Denpasar Selatan

Daftar Pustaka

- Armando, R.(2021, mei 28).*Banyak Kasus Penyelewengan Dana LPD,Wakil Ketua DPRD Bali Minta LPD Diaudit Setiap Tahun*. Retrieved from Tribun Bali:<https://bali.tribunnews.com/2021/05/28/banyak-kasus-penyelewengan-dana-lpd-wakil-ketua-dprd-bali-minta-lpd-diaudit-setiap-tahun>
- Cressey, D. 1953. *Other People's Money: a Study in the Social Psychology of Embezzlement*. Glencoe, IL: Free Press.
- Ekbis, B.(2021, september 28). *Dugaan Korupsi Di LPD Serangan, Kejaksaaan masih kumpulkan bukti*. Retrieved from Bali Ekbis Informatif dan Berbudaya: <http://www.baliekbis.com/dugaan-korupsi-di-lpd-serangan-kejaksaaan-masih-kumpulkan-bukti/>
- Ghozali, I.(2011). *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS*. Semarang: Badab Penerbit Undip
- Ghozali,I.(2016). *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS*. Badan Penerbit Universitas Dipenogoro.
- Hestanto. (n.d.). *Teori Keagenan Menurut Beberapa Cendekiawan*.
- Hestanto. (n.d.). *Teori Keagenan Menurut Beberapa Cendekiawan*. Retrieved from Hestanto Personal Website: www.hestanto.web.id
- Mekari.(2018). *Kenali Istilah Fraud atau Kecurangan dalam Akuntansi*. *jurnal entrepreneur*.
- Ni Ketut Muliati, N. W. (2021). *Pengaruh Whistleblowing Dan Penerapan Hukum Karma Phala Pada Pencegahan Kecurangan Di LPDSe-Kota Denpasar*. *JUARA (Jurnal Riset Akuntansi)*, Vol. 11 No. 2 .
- Ni Made Mita Ariastuti, R. D. (2020). *Pengaruh Pengendalian Internal, Moralitas Dan Penerapan Good Corporate Governance Terhadap Pencegahan Fraud Pada LPD Se-Kecamatan DenpasarUtara*. *Hita Akuntansi dan Keuangan Universitas Hindu Indonesia Edisi Oktober 2020*.
- Ni Putu Yulia Paramitha. (2020). *Pengaruh Whistleblowing System, Good Corporate Governance Dan Efektivitas Pengendalian Internal Terhadap Pencegahan Kecurangan Dalam Pengelolaan Dana Desa*. *JIMAT (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi) Universitas Pendidikan Ganesha*, Vol : 11 No : 2.

